



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024



DINAS SOSIAL

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jl. Cut Nyak Dhien No. 01 Telp. (0541) 661049, Fax. (0541) 661033

TENGGARONG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

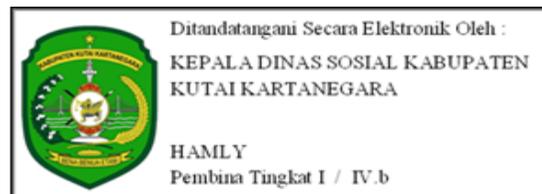
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen **Rencana Kerja PD Dinas Sosial tahun 2024** dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja PD pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu lima tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Dinas Sosial sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Rencana Kerja PD oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun dan kurun waktu lima tahun, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurang sempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen RENCANA KERJA PD ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, 4 Mei 2023



Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan	54
BAB V PENUTUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial, warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Untuk dapat memberikan pelayanan kepada PMKS secara komprehensif dengan mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi, maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis.

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting untuk mencapai masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan penanganan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk tahun 2024 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 dan selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan.

Rencana Kerja OPD merupakan Bentuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan

penyusunan Rencana Kerja OPD untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam beberapa aturan perundangan dibawahnya. Landasan hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ;
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
20. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ;
21. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) ;
22. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ;

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern;
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ;
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah ;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
35. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD setra tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
36. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah :

1. Mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam Rencana Strategis sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kebijakan dan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Menyediakan dokumen perencanaan yang lebih operasional baik dalam pelaksanaan maupun evaluasi pencapaian target yang ditentukan.
4. Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan sinergis dalam pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Naskah Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja_PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_Dinas Sosial tahun lalu dan capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2022 melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target tertentu sangatlah diperlukan. Besar kecilnya anggaran yang diperlukan tergantung pada seberapa besar fungsi yang dilaksanakan oleh suatu SKPD. Jika anggaran tersedia secara memadai maka target yang ingin dicapai untuk mewujudkan indikator tertentu akan cenderung tercapai. Sebaliknya jika anggaran tidak tersedia secara memadai maka akan sulit untuk mencapai target yang diharapkan.

Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap menurunnya realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama pada tahun 2023 adalah faktor sumber daya manusia. Dinas Sosial merupakan dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten. Tugas utama tersebut dilaksanakan dalam bentuk perubahan perilaku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari yang semula disfungsi sosial kemudian menjadi perilaku yang dapat berfungsi sosial secara optimal. Setelah para PMKS dapat berfungsi sosial secara optimal maka diberikan bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan untuk mempertahankan keberfungsian sosialnya.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk bidang sosial terdapat 6 program yang meliputi : Program Pemberdayaan Sosial; Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana serta Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS

Program ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pelayanan yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial yang dapat diuraikan berdasarkan jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti.
Indikator dari jenis pelayanan ini adalah jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Pada tahun 2022 dari target sebanyak 2.569 orang sudah terlayani sebanyak 2.967 orang atau sekitar 115,49 %. Adapaun sumber pembiayaan untuk pelayanan berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI, Program Bantuan Sosial Terencana Provinsi Kaltim dan Program Rehabilitasi Sosial bagi PMKS dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti.
Indikator dari jenis pelayanan ini adalah jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti. Pada tahun 2022 dari target pelayanan sebanyak 11.221 anak terlayani sebanyak 11.143 anak atau sekitar 99,30 % yang terlayani melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI dan Program Rehabilitasi Sosial bagi PMKS dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti.
Indikator dari jenis pelayanan ini adalah jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti. Pada tahun 2022 jumlah lanjut usia terlantar yang harus dilayani sebanyak 8.057 orang dan yang terlayani sebanyak 7.218 orang atau sekitar 89,59 %, melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI, Program

atensi Kementerian Sosial RI, Bansos Terencana Provinsi Kaltim layanan rujukan BPJS dan Program Rehabilitasi Sosial bagi PMKS dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti.

Indikator dari jenis pelayanan ini adalah jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti. Pada tahun 2022 terdapat 84 orang yang mendapatkan pelayanan dari target 84 orang yang harus dilayani berdasarkan kejadian yang ada jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 84 orang dan terlayani melalui Program Rehabilitasi Sosial bagi PMKS dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

b. Program Pemberdayaan Sosial

- 1) Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Sasaran kegiatan ini adalah lembaga kesejahteraan sosial atau sarana sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Pekerjaan yang dilakukan berupa pembinaan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial melalui sistem panti. Sasarannya adalah 18 lembaga kesejahteraan sosial yang telah terdaftar dan target hingga akhir tahun ini adalah sosialisasi terhadap seluruh LKSA yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara agar segera memenuhi persyaratan resmi yang telah ditetapkan dan kedepannya dinas sosial memberikan bimbingan terkait pemenuhan akreditasi LKSA tersebut.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan ini merupakan program pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dalam rangka untuk membantu masyarakat miskin dimaksudkan sebagai upaya percepatan dalam memutus mata rantai kemiskinan yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara. pemerintah daerah menyediakan bantuan kepada kelompok penerima manfaat yang terdiri dari disabilitas terlantar, anak terlantar serta lanjut usia terlantar yang belum mendapatkan program bantuan sosial baik dari Pusat maupun Provinsi. Selanjutnya menyediakan honorarium dan biaya operasional petugas pendamping dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan. Melalui kegiatan ini Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan kontribusi untuk menunjang operasional kegiatan dan bantuan biaya lain yang diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku. Bantuan biaya ini diberikan untuk kebutuhan selama 12 bulan.

2) Peningkatan Kapasitas Petugas Kesejahteraan Sosial

Kegiatan ini bertujuan memberikan ketrampilan dan pemahaman dalam pengelolaan Data Kemiskinan bagi Puskesmas Desa maupun Kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Kutai. Puskesmas diharapkan akan menjadi perpanjangan tangan Dinas Sosial di Desa dan Kelurahan dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan sosial yang mungkin muncul ditengah masyarakat. Puskesmas juga akan dibekali kemampuan mengaplikasikan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang menjadi alat pendataan bagi warga miskin yang berhak menerima bantuan dari pemerintah.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra_PD;

Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan kesejahteraan sosial saat ini masih akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. Tantangan tersebut berasal dari kecenderungan berkembangnya jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya aparatur yang berlatar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Strategi dan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial disusun sebagai acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial. Kebijakan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam langkah kerja operasional berupa program-program pelayanan maupun program penunjang pelayanan kepada kelompok sasaran. Dalam menentukan

program pelayanan setidaknya ada 2 (dua) instrumen yang harus dipedomani yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Setiap program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai indikator program. Indikator kinerja program merupakan indikator kinerja manfaat (*outcome*) sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan indikator kinerja keluaran (*output*). Indikator *outcome* bisa diperoleh jika indikator *output* dari masing-masing kegiatan dapat berfungsi. Sedangkan indikator *output* merupakan indikator yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Diantara indikator *output*, *outcome* dan indikator kinerja sasaran memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja_PD Tahun 2023 hingga semester pertama secara ringkas dapat dilihat pada tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Lembar:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target		
					Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	78	83.48	107.03	79		
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian	40	8	100.00	8	24	60.00
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	120	12	100.00	12	36	30.00
1	06	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	18	4	100.00	4	12	66.67
1	06	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	20	2	100.00	2	6	30.00

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Lembar:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	44	8	8	8	100.00	8	24	54.55
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	25	25	20	80.00	30	75	75.00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88	86.97	84	84	100.00	86	85.66	97.34
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	50	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
1 06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	97.63	94.33	90.02	95.43	100	95.88	95.88
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	7650	4100	1100	1100	100.00	1050	6250	81.70

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Lembar:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	1575	368	270	270	100.00	295	933	59.24
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	89.59	100	89.59	89.59	100	93.06	93.06
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpeliharanya anak-anak terlantar	25	7	7	7	100.00	7	21	84.00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	20	4	4	4	100.00	4	12	60.00
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola	100	25	25	25	100.00	25	75	75.00
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100	25	25	25	100.00	25	75	75.00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum capaian indikator kinerja kunci pelaksana urusan wajib Bidang Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Sosial.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan kesejahteraan sosial saat ini masih akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. Tantangan tersebut berasal dari kecenderungan berkembangnya jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya aparatur yang berlatar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial secara ringkas dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut ini :

Tabel T-C.30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara**

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA-PD				REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja		Nilai SAKIP	74.76	78.00	79.00	81.00	74.76	83.48	83.50	83.85	
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	SPM	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100.00	100.00	100.00	100.00	90.02	97.04	98.00	99.00	
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	SPM	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya tergambar dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Urusan Wajib Sosial. Berdasarkan dokumen tersebut kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial tergambar dari ketersediaan sarana sosial, persentasi PMKS yang ditangani dan diberikan bantuan sosial.

Indikator persentasi penanganan PMKS di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2021. Angka ini dihitung dari jumlah keseluruhan PMKS yang ada dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ditangani, baik melalui pola bimbingan sosial dan pemberian bantuan sosial. Pada tahun 2021 sejumlah 90,02% PMKS menerima pelayanan, angka ini meningkat menjadi 97,04 % pada tahun 2022. Data ini menunjukkan bahwa PMKS di Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil dilayani oleh Dinas Sosial dengan signifikan. Namun demikian bila dibandingkan dengan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dimana ditargetkan penanganan PMKS sebesar 100%, maka capaian kinerja tersebut masih belum tercapai.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tergambar dari pelaksanaan tugas setiap bidang. Untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilakukan melalui identifikasi permasalahan tabel sebagai berikut :

Tabel
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Aspek Kajian	Permasalahan
Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum tersedia aturan hukum lokal yang mengatur kriteria kemiskinan yang berbasis pada kearifan local. b. Kurangnya tenaga terampil aparatur di Desa dan Kelurahan dalam proses pemutakhiran Data. c. Masih tingginya subyektifitas petugas pengolah data di kelurahan maupun desa dalam melakukan verifikasi dan validasi data. d. Tingkta akurasi data yang masih rendah. e. Akses internet yang belum tersedia baik dibeberapa wilayah.
Bantuan stimulan bagi fakir miskin dan pendampingnya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana bantuan stimulant dan pendampingnya bagi fakir miskin belum tersedia anggarnya. b. Belum tersedia tenaga fungsional pendamping sosial.
Sarana dan prasarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana prasarana panti sosial kurang memadai b. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan standar pelayanan panti c. Belum tersedia panti rehabilitasi bagi ABH d. Belum tersedia pekerja sosial fungsional

Pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana selama masa tanggap darurat	a. Kuantitas dan kualitas TAGANA masih kurang b. Kendaraan lapangan untuk penanganan bencana dalam kondisi rusak.
Aspek Kajian	Permasalahan
Pelayanan sosial anak terlantar diluar panti	a. Kurangnya tenaga pendamping sosial untuk pelayanan diluar panti b. Sarana prasarana penunjang pelayanan belum tersedia
Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat dan trauma	a. Kurangnya instruktur vokasional bagi penyandang cacat dan trauma b. belum adanya perda yang mengatur tentang pelayanan sosial bagi penyandang cacat c. sarana prasarana rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat masih terbatas
Pelayanan kesejahteraan sosial melalui UPT	a. Keterbatasan sarana prasarana sehingga daya tampung sangat terbatas b. Kurangnya petugas yang memiliki bekal ketrampilan teknis pelayanan kesejahteraan anak melalui panti c. Kurangnya pengetahuan petugas tentang standar pelayanan lembaga kesejahteraan sosial
PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	a. Jenis PSKS yang ada sangat terbatas b. Kurang intensifnya pembinaan terhadap TKSM

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diketahui adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dalam mewujudkan beberapa indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD. Beberapa permasalahan tersebut ada yang saling memiliki keterkaitan dan kesamaan. Pada dasarnya permasalahan yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Perlunya Updating data pemerlu pelayanan terutama Basis Data Terpadu yang saat ini dijadikan acuan mutlak dalam melaksanakan pelayanan.
2. kurangnya kualitas SDM aparatur pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial
3. kurang memadainya sarana prasarana penunjang pelayanan
4. kurang tersedianya regulasi daerah yang dapat menjadi pedoman secara teknis dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih merupakan pedoman sekaligus sasaran yang ingin dituju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum program yang ditujukan untuk mencapai misi dilaksanakan, dilakukan analisa terhadap permasalahan dan factor-faktor yang mungkin dapat menghambat atau mendukung pelaksanaan program tersebut. Telaah terhadap kemungkinan adanya faktor penghambat ataupun pendukung pelaksanaan program ditampilkan dalam tabel berikut ini;

Tabel ;
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya			
	Program : Penanganan Fakir Miskin	Akurasi Basis Data Terpadu yang masih rendah Karen proses verivali sedang berjalan	Luas wilayah, banyaknya data yang harus diverivali,jaringan internet, SDM verivali data	Adanya dukungan program dari Kemensos dan dukungan KDH dalam proses verivali data.
	Program : Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Belum tersedianya panti panti rehabilitasi PMKS	Kuota Panti milik Provinsi terbatas	Upaya dilakukan melalui rehabilitasi berbasis masyarakat
	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial	Minimnya program komplementaritas bagi penerima manfaat Program Pusat	Transisi menuju bantuan non tunai sering terkendala system perbangkan	Pendampingan mulai intensif dilaksanakan dan sekaligus dalam rangka mensosialisasikan rencana pemenuhan program komplementaritas
	Program: Pemberdayaan Sosial	Belum optimalnya proses pemberdayaan PSKS	Kekosongan Pejabat pemangku	Adanya pendamping program yang diluncurkan kementerian Sosial RI
	Program: Pembinaan Panti Asuhan Anak / Panti Jompo	Perubahan SPM	Tanggung jawab pengelolaan panti ada pada pemerintah provinsi	Dalam masa transisi kabupaten masih diperkenankan melakukan pelayanan

Memperhatikan beberapa program yang disajikan untuk mencapai misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, perlu dilakukan beberapa penajaman terhadap indikator kinerja (outcome) dan program yang disajikan. Selain melakukan penajaman terhadap indikator kinerja dan mempertimbangkan ulang untuk menghapus nama beberapa program, dipandang perlu juga untuk Program Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Program Kementerian Sosial RI agar terjadi pula keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah. program baru didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024. Adapun program yang dipandang penting dalam upaya menyelaraskan dengan Rencana Kerja Daerah adalah :

1. Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Mengacu pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditujukan bagi PMKS yang termasuk dalam katagori kelompok yang memerlukan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dengan pendekatan persuasive, motovatif, dan koersif baik melalui keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.

SPM mengatur kewajiban pemerintah daerah kabupaten/ kota melaksanakan penguatan kelembagaan, infrastruktur, SDM dan pembiayaan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasarluar panti bagi anak terlantar, Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis terlantar.

2. Program Perlindungan dan jaminan sosial.

Program ini menitik beratkan sasarannya pada peningkatan kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui perlindungan sosial yang komprehensif, indikator sasaran program ini diantaranya adalah presentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandirianya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar dan presentase korban bencana dan kelompok rentan

3. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini penting untuk untuk dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam upaya penanggulangan Kemiskinan Di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini mencoba memaksimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan arah dan Kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sasaran program ini adalah Lembaga Swadaya masyarakat yang bergerak dalam penanganan masalah sosial baik organisasi maupun perorangan.

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan masalah sosial yang sifatnya sangat dinamis. Perkembangan masalah sosial terjadi seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat. Tantangan utama yang akan dialami oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengembangan pelayanan adalah kaderisasi sumberdaya manusia. Mulai tahun 2021 sampai tahun 2026 akan banyak pegawai Dinas Sosial yang memasuki usia pensiun. Mereka terdiri dari pegawai yang berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dan pegawai yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial sejak awal bertugas sebagai pegawai.

Tantangan yang dihadapi ini disisi lain merupakan peluang bagi Dinas Sosial untuk mengembangkan pelayanan. Pensiunnya pegawai senior ini memberikan peluang bagi pegawai yang ada untuk mengembangkan diri melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional. Peluang lain yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan ini tentunya dilaksanakan melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan

kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut sebagian merupakan tugas fungsi Dinas Sosial.

5. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

Memperhatikan beberapa permasalahan yang dialami Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok. Kelompok permasalahan ini merupakan masalah strategis yang merupakan isu strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beberapa isu strategis tersebut meliputi :

1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial
2. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan social
4. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Bupati Kutai Kartanegara, ditetapkan melalui serangkaian kebijakan dan program. Strategi ini sejalan dengan strategi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yang ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi KUKAR IDAMAN. Adapun kebijakan dan program tersebut sebagai berikut :

1. Kebijakan : Meningkatkan akses keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui program prioritas berikut ini :

a. Program Pembinaan Anak Terlantar

Anak adalah generasi penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya permasalahan pada anak dapat berdampak pada masa depan anak yang juga masa depan bangsa. Pembinaan terhadap anak terlantar dilakukan agar anak dapat menjalankan tugas perkembangannya dengan baik, sehingga menjadi manusia dewasa yang sejahtera. Pembinaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak dan mempersiapkan anak memasuki masa

dewasa.

- b. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- c. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)

2. Kebijakan : Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui program prioritas :

- a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Didalam masyarakat sudah terdapat upaya-upaya yang melembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Upaya ini ada yang dilaksanakan dalam lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kualitas manajemen pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan
- c. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial
- d. Program Pelestarian Nilai-nilai Kejuangan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2024 serta prospek tahun 2024 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 di tetapkan sebagai berikut :

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL								
RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP	79 Nilai	500.000.000		Tercapainya Nilai SAKIP	79 Nilai	500.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	200.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	100.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	200.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	10.402.156.097		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	10.402.156.097	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	10.077.156.097	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	10.077.156.097	Hasil Perhitungan dari BPKAD Kutai Kartanegara P1 = Wajib dan Mengikat

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	325.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	325.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	4 Laporan	189.460.000		Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	4 Laporan	189.460.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	89.460.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	89.460.000	Menambah Kuasa Pengguna Barang dan Staff Pengurus Barang P1 = Wajib dan Mengikat
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah di Kecamatan P1 = Wajib dan Mengikat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	2 Dokumen	580.000.000		Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	2 Dokumen	580.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	153 Paket	280.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	153 Paket	280.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan ASN dan Non ASN
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	100.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	200.000.000	Dalam rangka memenuhi target 20 JP per tahun bagi PNS

RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan	1.107.000.000		Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan	1.207.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	60.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	60.000.000	Lampu untuk kebutuhan Kantor, Aula, Gedung RTPC dan LBK
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	97.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	97.000.000	Kebutuhan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	150.000.000	Makan Minum Rapat, Makan Minum Tamu, Makan Minum Beseprah, Makan dan Minum Pawai, Logistik Kebersihan Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	100.000.000	Cetak Map Dinas, Lembar Disposisi
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	150.000.000	Bahan Material Pameran, Pawai, dll
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	250.000.000	Pelatihan Kearsipan bagi ASN dan Non ASN P1 = Wajib dan Mengikat
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	Inovasi SIMASOS

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	6.185.560.000		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.944.981.821	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	86 Unit	2.385.560.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	0 Unit	0	Rasionaliasi
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	215 Paket	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	215 Paket	540.832.000	Meja Kursi Pelayanan, Meja Kursi Rapat Lengkap, Meja Kerja, Filling Kabinet, Kursi Lipat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	200 Unit	3.500.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	437 Unit	2.404.149.821	Kelengkapan peralatan kerja komputer, laptop, audio visual, CCTV, AC, Kasur, dll
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.244.498.924		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.293.878.576	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	8.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	8.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	267.105.636	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	316.485.288	P1 = Wajib dan Mengikat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	969.393.288	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	969.393.288	Penambahan Biaya BPJS dan Petugas Outsourcing (46 Orang) P1 = Wajib dan Mengikat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100 Persen	2.275.000.000		Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100 Persen	2.719.850.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	470.000.000	Kendaraan Dinas, Sekretaris, 4 Kabid dan Sewa Kendaraan Dinas Kadis

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	300.000.000	Mobil Dapur Umum 1 Unit, Trcuk. Pick Up dan Operasional Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	75.000.000	Pemeliharaan service komputer, printer, dll
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.500.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.500.000.000	Rehab Kantor Dinsos, Aula, LBK, Gedung RPTC
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	41 Unit	374.850.000	Pemeliharaan AC, Peralatan Kantor, Gedung, Tambah Daya
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88 Persen	9.947.200.000		Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88 Persen	7.814.000.000	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	50 Orang	75.000.000		Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	50 Orang	75.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	75.000.000	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dikembangkan	100 Persen	9.872.200.000		Persentase PSKS yang dikembangkan	100 Persen	7.739.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	200.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	750.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	750.000.000	Penambahan Honorarium TKSK P2 = Standar Pelayanan Minimal
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	237 Lembaga	8.872.200.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	237 Lembaga	6.739.000.000	PUSKESSOS honor rencana Rp. 1 Juta/Org/Bulan berkurang menjadi Rp. 750 rb/Org/Bulan P2 = Standar Pelayanan Minimal
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100 Persen	100.000.000		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100 Persen	100.000.000	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani	100 Persen	100.000.000		Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani	100 Persen	100.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	100.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen	8.246.689.590		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen	5.759.089.590	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	2109 Orang	7.531.689.590		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	2109 Orang	5.044.089.590	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1491 Orang	5.723.300.590	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1491 Orang	3.235.700.590	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN; Penanggulangan Kemiskinan Jumlah KPM yang diberikan bantuan sebanyak 800 orang dimana untuk 691 orang sudah mendapatkan bantuan dari program PKH dan BPNT
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	250.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN; Penanggulangan Kemiskinan

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	500.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	500.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN; Penanggulangan Kemiskinan
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	150.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	118 Orang	733.389.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	118 Orang	733.389.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Inovasi ATLAS KUKAR
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	75.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	595 Orang	715.000.000		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS	595 Orang	715.000.000	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	100.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	80.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	80.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	60.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	60.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	2 Dokumen	75.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen 85 Persen	10.504.670.000		Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang	100 Persen 85 Persen	6.886.340.000	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpeliharanya anak-anak terlantar	25 Orang	645.640.000		Terpeliharanya anak-anak terlantar	25 Orang	645.640.000	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	645.640.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	645.640.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN; Penanggulangan Kemiskinan
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	100 Persen	9.859.030.000		Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	100 Persen	6.240.700.000	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	175000 orang	569.850.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	175000 orang	380.000.000	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN Untuk pendataan dilakukan melalui PUSKESOS yang sudah tersedia honorinya
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40919 KK	369.850.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40919 KK	369.850.000	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Penanggulangan Kemiskinan
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2368 Keluarga	7.928.480.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	773 Keluarga	4.500.000.000	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN Jumlah KPM yang diberikan bantuan sebanyak 773 orang dimana untuk KPM lainnya sudah mendapatkan bantuan dari program PKH dan BPNT
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	990.850.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	990.850.000	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan / / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen	1.050.000.000		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen	1.050.000.000	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	100 Persen	550.000.000		Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	100 Persen	550.000.000	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	300.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	250.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	4 Desa	500.000.000		Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	4 Desa	500.000.000	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Desa	100.000.000	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Desa	100.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	400.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	400.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola	100 Persen	1.450.000.000		Persentase TMP yang dikelola	100 Persen	1.450.000.000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100 Persen	1.450.000.000		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100 Persen	1.450.000.000	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.350.000.000	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	2 Dokumen	1.350.000.000	Tempat peringatan Hari Pahlawan dan Peristiwa Merah Putih
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	100.000.000	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan	2 Makam	100.000.000	Tempat peringatan Hari Pahlawan dan Peristiwa Merah Putih
TOTAL			53.782.234.611				42.896.756.084	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian pengumpulan informasi dilapangan dan pengamatan maka disusun dan diusulkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 meliputi 7 (Tujuh) program yang dilaksanakan dalam 18 (Delapan Belas) kegiatan, dan 60 (Enam Puluh) sub kegiatan. Adapun target sasaran dan target output yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	6 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	79 orang/ Bulan	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semeste SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	4 Laporan	

		SKPD			
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	157 Paket	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	15 Orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Paket	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	20 Paket	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Paket	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Melayu	4 Paket	
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	10 Paket	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	300 Laporan	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	500 Dokumen	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	0 Unit	

		Jabatan yang Disediakan			
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	215 Paket	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	200 Unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Laporan	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	7 Unit	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	29 Unit	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	78 Unit	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Unit	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	41 Unit	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1 Dokumen	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					

1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237 Lembaga	
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Sertifikat	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 Orang	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	200 Orang	

		Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118 Orang	
6	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	
7	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	100 Orang	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	
2	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	
3	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	

4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	
6	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	
7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175000 Orang	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40919 KK	
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1358 KK	
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					

1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	4 Desa/ Kelurahan	
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Dokumen	
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Makam	

Berdasarkan proses perencanaan yang telah dilaksanakan terdapat beberapa usulan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran pihak legislatif yang terkait dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan bidang sosial yang telah disampaikan melalui

aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk tahun anggaran 2024
yaitu :

Tabel T-C.32.							
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024							
Kabupaten Kutai Kartanegara							
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial							
No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Sarana Prasarana Panti Asuhan Anak	Rehab Lantai Asrama Panti Asuhan Raudatul Amin RT. 06		Jl. Perjuangan Gg. Mutiara 2 Rt. 06, Kab. Kutai Kartanegara			Untuk pekerjaan rehab asrama panti asuhan bukan menjadi kewenangan Dinas Sosial. Sarana Prasarana dimaksud dalam kamus usulan berupa perabot/meubelair, tempat tidur, dll
2	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan Kapasitas Tim Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) (Minimnya pemahaman tim PUSKESOS dalam pelayanan masyarakat dibidangnya)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Bangun Rejo, Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara	Pelatihan Pengembangan SDM PUSKESOS	1 Paket	Kegiatan akan dijadikan satu dengan seluruh PUSKESOS yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara
3		Pelatihan Penguatan Bagi Penyandang Dipabel	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.	Desa Kayu Batu, Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara	Pelatihan Pengembangan dan Pemberdayaan Disabilitas	1 Paket	Akan dijadikan satu dengan disabilitas lainnya se Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial. Pihak kecamatan agar dapat menyampaikan Data Disabilitas/ Difabel yang ada kepada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
1	Sarana Prasarana Panti Asuhan Anak	Lanjutan Pembangunan Panti Asuhan Al-Kahfi		Jl. Al-Jawahir RT.8 No.2 Kelurahan Baru			Untuk pekerjaan panti asuhan bukan menjadi kewenangan Dinas Sosial. Sarana Prasarana dimaksud dalam kamus usulan berupa perabot/meubelair, tempat tidur, dll

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal. Salah satu lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan adalah sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diperoleh informasi tabel sebagai berikut :

Tabel ;
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen dari target nasional pada tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber data yang akan dijadikan basis data belum tersedia dengan mudah dan cepat 2. Koordinasi dengan instansi penyedia data belum berjalan dengan baik, karena adanya pembatasan kewenangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terintegrasinya aplikasi pengolah dan penyedia data PMKS dengan basis data kemiskinan 2. Kurangnya kapasitas SDM dalam pengelolaan basis data kemiskinan dan PMKS 	Memberikan peluang kerjasama dengan instansi penyedia data untuk meningkatkan kualitas basis data dalam mendukung pencapaian sasaran
2	Pengembangan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan kesejahteraan sosial (LKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pendamping dan pembimbing LKS 2. Kerjasama dengan BBPPKS dalam pengembangan kapasitas SDM belum berjalan dengan baik 		Menjadi faktor pemicu dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur diperoleh informasi tabel sebagai berikut :

Tabel ;
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
berdasarkan Sasaran Renstra Dinsos Prov Kalimantan Timur
Tahun 2019-2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov Kaltim	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dimensi kualitas hidup yang sangat luas sehingga perlu diturunkan secara lebih khusus untuk memudahkan penanganan	Tidak adanya informasi yang tegas tentang berapa kontribusi yang diharapkan dari Kabupaten/Kota untuk mencapai target sasaran tersebut	
2	Meningkatkan potensi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Upaya peningkatan potensi sosial PMKS masih dipahami dengan sangat sederhana dan terbatas	PMKS sangat mengharapkan upaya pemberdayaan yang bersifat instan, bukan pemberdayaan yang sebenarnya merupakan proses yang cenderung Panjang	Kebijakan Kepala Daerah untuk pemberdayaan masyarakat sangat tinggi
3	Meningkatkan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1. PSKS terutama TKSM yang jumlahnya paling banyak, kondisinya banyak yang sdh tidak aktif lagi 2. TKSM yang ada sudah banyak yang memasuki usia lanjut 3. PSKS yang masih potensial jumlahnya sangat terbatas dan sebarannya cukup jauh	Pola pembinaan dan pemberian wewenang yang kurang jelas terutama bagi TKSM	Adanya kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, memerlukan partisipasi aktif dari PSKS
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	1. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur	1. Penempatan SDM Aparatur yang tidak sesuai dengan disiplin	Kebijakan Kepala Daerah untuk meningkatkan

		<p>2. Banyaknya aturan penyelenggaraan pemerintahan yang seringkali membingungkan dalam pelaksanaannya</p> <p>3. Terbatasnya sarana prasarana penunjang kinerja SKPD</p>	<p>ilmu yang dikuasainya</p> <p>2. Tidak tersedianya petunjuk teknis operasional yang jelas dan mudah dioperasikan</p>	<p>kualitas akuntabilitas kinerja dengan memberikan <i>reward and punishment</i> yang jelas</p>
--	--	--	--	---

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja_PD

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang akan mendasari penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai oleh SKPD. Pernyataan tujuan ini selanjutnya akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah bahwa tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan SKPD;
2. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
3. Kelompok sasaran yang dilayani;
4. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
5. Isu-isu strategis SKPD yang sesuai dengan bidang layanan SKPD;
6. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
7. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan
8. Kriteria SMART-C yaitu:

- a) *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b) *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c) *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e) *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f) *continuously improve (perbaikan berkelanjutan)*, yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dirumuskan dalam tabel berikut ini :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2021 (target)	2021 (realisasi)	2022	2024	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar		Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	94,33%	94,23%	97,63%	95,50%	96,66%	97,83%	99,00%	99,00%
		Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	94,33%	94,23%	97,63%	95,50%	96,66%	97,83%	99,00%	99,00%
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Predikat akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai	74,76	83,48	83,50	83,50	83,75	83,85	84,00	84,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, Misi Kepala Daerah yang dibebankan Kepada Dinas Sosial diantaranya :

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
- b) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.

Selanjutnya dari 23 Program Dedikasi KUKAR IDAMAN terdapat 1 Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN yang merupakan bagian dari peran tugas dan fungsi Dinas Sosial untuk dapat mewujudkan program dimaksud.

2. Pencapaian SDGs

Dalam hal pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan Dinas Sosial memberikan kontribusi dalam penanganan dan upaya penegentasan kemiskinan. Terlihat dari beberapa program dan kegiatan yang disasarkan kepada kelompok marginal. Dalam hal penanganan kemiskinan, masyarakat Kutai Kartanegara yang masuk didalam Basis Data Terpadu Kemiskinan memperoleh bantuan Sosial juga dari Kementerian Sosial RI melalui Program PKH dan BPNT dimana Kabupaten memiliki kewajiban mendukung kegiatan pendampingan terhadap pelaksanaan program tersebut.

3. Pengentasan Kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya tidak mungkin dibebankan kepada Dinas Sosial saja Karena dari sisi kriteria kemiskinan sendiri terdapat beberapa bagian merupakan tanggung jawab instansi terkait lainnya. Dinas Sosial berfungsi lebih

kepada upaya pemenuhan Jaminan Hidup dan fasilitasi terhadap aksesibilitas warga miskin dalam memperoleh pelayanan yang layak. Oleh karena itu kolaborasi antar seluruh stake holder terkait sangat diperlukan dalam memecahkan masalah pengentasan kemiskinan. Dan harapannya Dinas Sosial ada digarda terdepan dalam upaya upaya tersebut, bukan berate sebagai penanggungjawab utama tetapi lebih kepada perumusan strategi penanganan kemiskinan yang tepat dan sesuai dengan karakter kemiskinan wilayah.

4. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

5. Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang menjadai tanggung jawab instansi Sosial di daerah menurut Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang SPM bidang Sosial Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota diantaranya :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial.
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Dalam hal ketersediaan anggaran Perangkat daerah telah berupaya melakukan pemenuhan terhadap SPM tersebut.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
1. Pada tahun anggaran 2024 Jumlah Program yang dilaksanakan Dinas Sosial sebanyak 7 Program dengan 19 kegiatan.
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Kegiatan yang bersifat pendampingan dan juga yang terfokus ke satu Kecamatan atau Desa jika jenis kegiatannya bersifat Pelatihan Keterampilan.
 3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2024 adalah sebesar Rp. 53.782.234.611, -
- c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial tahun 2024 dan Perkiraan maju Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			42.896.756.084				45.423.789.822				
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	19.837.326.494	APBD (Dana Bagi Hasil)		82 Nilai	15.679.100.822			
1	06	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP	81 Nilai	500.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	82 Nilai	500.000.000			
1	06	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	6 Dokumen	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	7 Dokumen	200.000.000
1	06	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	12 Laporan	100.000.000
1	06	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	4 Laporan	200.000.000
1	06	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		22 Laporan	10.402.156.097	APBD (Dana Bagi Hasil)		22 Laporan	10.500.247.534
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	79 Orang/Bulan	10.077.156.097	APBD (Dana Bagi Hasil)	Hasil Perhitungan dari BPKAD Kutai Kartanegara P1 = Wajib dan Mengikat	79 Orang/Bulan	10.200.247.534

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	06	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	325.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	12 Laporan	300.000.000
1	06	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD		6 Laporan	189.460.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		4 Laporan	189.460.000
1	06	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	4 Laporan	89.460.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Menambah Kuasa Pengguna Barang dan Staff Pengurus Barang P1 = Wajib dan Mengikat	4 Laporan	89.460.000
1	06	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Seluruh Kecamatan	2 Laporan	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Inventarisasi Barang Milik Daerah di Kecamatan P1 = Wajib dan Mengikat	1 Laporan	100.000.000
1	06	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial		2 Dokumen	580.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Dokumen	580.000.000
1	06	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	157 Paket	280.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan ASN dan Non ASN	153 Paket	280.000.000
1	06	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	2 Dokumen	100.000.000
1	06	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	15 Orang	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Dalam rangka memenuhi target 20 JP per tahun bagi PNS	15 Orang	200.000.000
1	06	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial		8 Layanan	1.207.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		8 Layanan	1.207.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025																																						
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif																																					
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10				
1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Paket	60.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Lampu untuk kebutuhan Kantor, Aula, Gedung RTPC dan LBK	5 Paket	60.000.000																																				
1	06	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	20 Paket	97.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Kebutuhan Alat Tulis Kantor	20 Paket	97.000.000																																				
1	06	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Paket	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Makan Minum Rapat, Makan Minum Tamu, Makan Minum Beseprah, Makan dan Minum Pawai, Logistik Kebersihan Kantor	3 Paket	150.000.000																																				
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	4 Paket	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Cetak Map Dinas, Lembar Disposisi	4 Paket	100.000.000																																				
1	06	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	10 Paket	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Bahan Material Pameran, Pawai, dll	10 Paket	150.000.000																																				
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Laporan	300.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	300 Laporan	300.000.000																																				
1	06	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	500 Dokumen	250.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Pelatihan Kearsipan bagi ASN dan Non ASN P1 = Wajib dan Mengikat	500 Dokumen	250.000.000																																				
1	06	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Inovasi SIMASOS	1 Dokumen	100.000.000																																				
1	06	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen	2.944.981.821	APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Persen	400.000.000																																				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	
1	06	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	0	0	APBD (Dana Bagi Hasil)	Kendaraan Dinas Roda 4 Ess IV dan Kendaraan Roda 2 Pendamping PKH	0	0
1	06	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	215 Paket	540.832.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Meja Kursi Pelayanan, Meja Kursi Rapat Lengkap	60 Paket	100.000.000
1	06	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	200 Unit	2.404.149.821	APBD (Dana Bagi Hasil)	Kelengkapan peralatan kerja komputer, laptop, audio visual, CCTV, AC, Internet	30 Unit	300.000.000
1	06	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	1.293.878.576	APBD (Dana Bagi Hasil)		12 Bulan	1.277.393.288
1	06	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Laporan	8.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		3 Laporan	8.000.000
1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	316.485.288	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	12 Laporan	300.000.000
1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	969.393.288	APBD (Dana Bagi Hasil)	Penambahan Biaya BPJS dan Petugas Outsourcing (46 Orang) P1 = Wajib dan Mengikat	12 Laporan	969.393.288
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial		100 Persen	2.719.850.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Persen	1.025.000.000
1	06	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	7 Unit	470.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Kendaraan Dinas Kadis, Sekretaris, 4 Kabid	6 Unit	300.000.000
1	06	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	29 Unit	300.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Mobil Dapur Umum 1 Unit, Truk. Pick Up dan Operasional Lapangan	29 Unit	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025												
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif											
1				2				3		4		5		6		7		8		9		10	
1	06	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	78 Unit	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Pemeliharaan service komputer, printer, dll	78 Unit	75.000.000										
1	06	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Unit	1.500.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Rehab Kantor Dinsos, Aula, LBK, Gedung RPTC	5 Unit	250.000.000										
1	06	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	41 Unit	374.850.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Pemeliharaan AC, Peralatan Kantor, Gedung, dll	41 Unit	100.000.000										
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	88 Persen	7.814.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		88 Persen	9.947.200.000										
1	06	02	2,02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan		50 Orang	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		50 Orang	75.000.000										
1	06	02	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	75.000.000										
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dikembangkan		100 Persen	7.739.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Persen	9.872.200.000										
1	06	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	60 Orang	200.000.000										
1	06	02	2,03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	750.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Penambahan Honorarium TKSK P2 = Standar Pelayanan Minimal	20 Orang	750.000.000										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	
1	06	02	2,03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237 Lembaga	6.739.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	PUSKESSOS P2 = Standar Pelayanan Minimal	237 Lembaga	8.872.200.000
1	06	02	2,03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Sertifikat	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	5 Sertifikat	50.000.000
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan		100 Persen	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Persen	200.000.000
1	06	03	2,01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani		100 Persen	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Persen	200.000.000
1	06	03	2,01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Orang	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	40 Orang	200.000.000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		100 Persen	5.759.089.590	APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Persen	8.290.989.000
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti		1468 Orang	5.044.089.590	APBD (Dana Bagi Hasil)		1468 Orang	7.575.989.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 Orang	3.235.700.590	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN; Penanggulangan Kemiskinan	800 Orang	5.767.600.000				
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	250.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN; Penanggulangan Kemiskinan	200 Orang	250.000.000				
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	500.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN; Penanggulangan Kemiskinan	150 Orang	500.000.000				
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	50 Orang	150.000.000				
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118 Orang	733.389.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Inovasi ATLAS KUKAR	118 Orang	733.389.000				
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	50 Orang	75.000.000				
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	100 Orang	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	100 Orang	100.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti		595 Orang	715.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		595 Orang	715.000.000
1	06	04	2,02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	75 Orang	100.000.000
1	06	04	2,02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	200 Orang	200.000.000
1	06	04	2,02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	80.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	200 Orang	80.000.000
1	06	04	2,02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	60.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	20 Orang	60.000.000
1	06	04	2,02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	100 Orang	100.000.000
1	06	04	2,02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	100 Orang	100.000.000
1	06	04	2,02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	2 Dokumen	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	06	05			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial		100 Persen 85 Persen	6.886.340.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Persen 85 Persen	9.856.500.000
1	06	05	2,01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpeliharanya anak-anak terlantar		25 Orang	645.640.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		25 Orang	652.900.000
1	06	05	2,01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	645.640.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN; Penanggulangan Kemiskinan	25 Orang	652.900.000
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial		100 Persen	6.240.700.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Persen	9.203.600.000
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175000 orang	380.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	194893 orang	380.000.000
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40919 orang	369.850.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Penanggulangan Kemiskinan	40919 orang	380.000.000
1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2368 Keluarga	4.500.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	2368 Keluarga	7.943.600.000
1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	990.850.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	75 Orang	500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten		100 Persen	1.050.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Persen	1.050.000.000
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani		100 Persen	550.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Persen	550.000.000
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	300.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	1500 Orang	300.000.000
1	06	06	2,01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	250.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	1500 Orang	250.000.000
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana		4 Desa	500.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		4 Desa	500.000.000
1	06	06	2,02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	4 Desa	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	4 Desa	100.000.000
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	25 Orang	400.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	25 Orang	400.000.000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola		100 Persen	1.450.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Persen	400.000.000
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara		100 Persen	1.450.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		100 Persen	400.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	07	2,01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Dokumen	1.350.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Tempat peringatan Hari Pahlawan dan Peristiwa Merah Putih	2 Dokumen	300.000.000
1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Makam	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Tempat peringatan Hari Pahlawan dan Peristiwa Merah Putih	2 Makam	100.000.000
									42.896.756.084				45.423.789.822

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, proses penyusunan RKPD Tahun 2024 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;

1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial.
2. Optimalisasi Kegiatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
3. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kebutuhan saat ini adalah perlunya tersedia kendaraan khusus angkutan PMKS sebagai bentuk pemenuhan SPM bidang Sosial.
4. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

b. Kaidah - kaidah pelaksanaan ;

Berdasarkan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk kurun waktu satu tahun. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja PD Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara kurun waktu 2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra perlu dievaluasi berkala untuk menjamin bahwa target kinerja yang telah disusun masih relevan dengan kebutuhan perkembangan permasalahan sosial.

c. Rencana tindak lanjut ;

1. Peningkatan Kualitas Sumber daya aparatur penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
2. Optimalisasi Pemutakhiran DTKS.
3. Penyediaan Kendaraan Khusus PMKS.
4. Sinergitas antar stakeholders.

Rencana Kerja (RENJA) PD berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Kerja (RENJA) PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Akhirnya semoga Dokumen Rencana Kerja (Renja) PD ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Akhirnya semoga Dokumen Renja PD tahun 2024 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

LAMPIRAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
PENUNJANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	
1	2				3	4	5	6	7	8	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			21,534,429,590			
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	88 Persen	7,739,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dikembangkan		100 Persen	7,739,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang	200,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	750,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Penambahan Honorarium TKSK P2 = Standar Pelayanan Minimal
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237 Lembaga	6,739,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	PUSKESSOS P2 = Standar Pelayanan Minimal
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Sertifikat	50,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan		100 Persen	100,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani		100 Persen	100,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Orang	100,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		100 Persen	5,759,089,590	APBD (Dana Bagi Hasil)	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti		1468 Orang	5,044,089,590	APBD (Dana Bagi Hasil)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 Orang	3,235,700,590	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN; Penanggulangan Kemiskinan
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	250,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN; Penanggulangan Kemiskinan
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	500,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN; Penanggulangan Kemiskinan
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	150,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118 Orang	733,389,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Inovasi ATLAS KUKAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	75,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	100 Orang	100,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti		595 Orang	715,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	100,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	200,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	80,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	60,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	75,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial		100 Persen 85 Persen	6,886,340,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpeliharanya anak-anak terlantar		25 Orang	645,640,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	
1				2		3	4	5	6	7	8
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	645,640,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN; Penanggulangan Kemiskinan
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial		100 Persen	6,240,700,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175000 orang	380,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40919 orang	369,850,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Penanggulangan Kemiskinan
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2368 Keluarga	4,500,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	990,850,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	
1				2		3	4	5	6	7	8
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten		100 Persen	1,050,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani		100 Persen	550,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	300,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	250,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana		4 Desa	500,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	4 Desa	100,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	25 Orang	400,000,000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL

Jalan : Cut Nyak Dhien No. 01 Telepon : 661049 – 661616 Kode Pos : 75512
T E N G G A R O N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : P- 999/DINSOS/SET.II/050/05/2023

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Dinas Sosial Rencana tentang Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026 Halaman | I-8 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten / Kota Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 nomor 7);
26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, merupakan acuan dan rencana kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang ingin dicapai pada tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 4 Mei 2023

